

ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

¹Masta Dahlia Napitupulu

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail : mastanapitupulu@gmail.com

Diajukan : 07/Juni/2024
Direvisi : 11/Juni/2024
Diterima : 15/Juni/2024

ABSTRACT

This research examines the Implementation Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) of Villages Through the Development of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Bakal Gajah Village, Silima Punggapungga District, Dairi Regency. The purpose of this research is intended to find out how the development of BUMDes to realize the objectives of the Village SDGs Program and to find out how many obstacles and support BUMDes faces to realize Village SDGs in Bakal Gajah Village.

The type of research used in this study is qualitatively descriptive. The location of this research was carried out in Bakal Gajah Village, Silima Punggapungga District, Dairi Regency. The data collected in this study was obtained using interview techniques and documentation is then processed into narrative forms. Informants in this study are key informants as many as 2 people (Chairman of BUMDes and Head of Bakal Gajah Village), and the main informant in the village community of Bakal Gajah as many as 5 people. Transcript data results are analyzed by managing, preparing data, sorting, coding data, and interpreted and then concluded.

The results of this study show that the development of BUMDes since 2019 can realize the achievement of sustainable development goals (SDGs) well, namely the achievement of villages worthy of clean water and sanitation, villages of economic growth and decent jobs, as well as partnerships for village development through communication stages, resource management, implementing attitudes (dispositions) and bureaucratic structures with business units such as drinking water depot units, gas cylinders, broiler chicken farming unit and Bri Link banking services unit. But in its development, there are still obstacles in this activity such as lack of community participation and lack of cost budget so that it has not run optimally as expected.

Policy recommendations to the village government should be more aggressive in training and socialization both directly and the use of social media to attract the attention of youth and village communities so that the empowerment of the community is optimally empowered to further improve welfare in the village community.

Key word: Implementation, Sustainable Development Goals (SDGs) Village, BUMDes

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengembangan BUMDes untuk mewujudkan tujuan Program SDGs Desa serta untuk mengetahui seberapa

besar kendala dan dukungan yang dihadapi BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa di Desa Bakal Gajah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menjadi bentuk narasi. Informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci sebanyak 2 orang (Ketua BUMDes dan Kepala Desa Bakal Gajah), dan informan utama yaitu masyarakat desa Bakal Gajah sebanyak 5 orang. Hasil transkrip data dianalisis dengan mengelola, mempersiapkan data, mengurutkan, membuat koding data, dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes sejak tahun 2019 dapat mewujudkan tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan baik yakni tercapainya desa layak air bersih dan sanitasi, desa pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta kemitraan untuk pembangunan desa melalui tahapan komunikasi, pengelolaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi dengan unit usaha seperti unit depot air minum, unit gas elpiji, unit peternakan ayam broiler dan unit jasa perbankan Bri Link. Namun dalam pengembangannya masih terdapat kendala dalam kegiatan ini seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran biaya sehingga belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan.

Rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah desa harus lebih gencar melakukan pelatihan dan sosialisasi baik secara langsung maupun penggunaan media sosial untuk menarik perhatian pemuda dan masyarakat desa agar pemberdayaan masyarakat berdaya secara optimal sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa.

Kata kunci: Implementasi, Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, BUMDes

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah agenda program SDGs, dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang terukur dengan target waktu yang telah ditentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia SDGs ini disahkan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu

Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh banyak negara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak.

Sebagaimana yang terdapat pada tujuan SDGs Desa pada tujuan keenam (6) yaitu desa layak air bersih dan sanitasi, tujuan kedelapan (8) yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan ketujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. SDGs Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yakni dengan hadirnya BUMDes.

Seperti halnya Desa Adijaya yang merupakan desa yang berada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak dikatakan masih memiliki tingkat pendapatan yang masih rendah atau tidak pasti karena hasil panen terkadang tidak dapat diandalkan. Hal tersebut mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung berupa beras bukan bantuan modal usaha ataupun modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, justru hal demikian akan menghambat inovasi

dan kreativitas masyarakat desa dalam mengelola ekonomi dan berakibat memiliki sikap ketergantungan terhadap bantuan pemerintah hal ini perlahan akan mematikan semangat kemandirian. Dengan segala pertimbangan dan kondisi yang didapati di desa Adijaya berupa potensi yang ada yakni pengolahan pupuk organik melalui kotoran ternak hewan dimana sebagian penduduk merupakan peternak dan pupuk tersebut akan digunakan pada pertanian. Pengembangan potensi yang dimiliki desa Adijaya yang dikelola oleh BUMDes mendatangkan nilai positif khususnya bagi masyarakat desa, dimana peternak menjual dan memperoleh hasil penjualan limbahnya kepada BUMDes kemudian limbah diolah oleh BUMDes menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan.

Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi merupakan salah satu desa yang sudah mempunyai BUMDes dan telah berjalan selama satu tahun. BUMDes ini dinamai dengan BUMDes 'Gajah Mandiri', resmi

beroperasi April 2019. Keberadaan BUMDes 'Gajah Mandiri' ini telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten dimana Bupati Dairi Eddy Berutu secara langsung meninjau perkembangan BUMDes dengan memberikan dukungan dan apresiasinya terkait usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pemerintah Desa Bakal Gajah mampu berupaya melakukan pendayagunaan potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar dan alam untuk dikelola oleh desa sebagai bentuk dalam Peningkatan Asli Desa.

BUMDes Desa Bakal Gajah memiliki unit-unit usaha diantaranya berupa pengelolaan air minum yang diperoleh dari sumur bor yang telah melalui proses penyaringan dengan standar sterilisasi dan sudah mendapat sertifikasi dari pemerintah provinsi. Unit usaha lain juga berupa peternakan ayam broiler sistim plasma yang telah bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed. Unit usaha ini telah cukup banyak memberikan keuntungan selain dengan nilai hasil usaha juga telah memberdayakan masyarakat,

dengan merekrut masyarakat desa sebagai pengelola/pekerja di unit usaha ini.

BUMDes Gajah Mandiri sejauh ini sudah cukup berdampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui tersedianya air bersih. Namun disisi lain masih memiliki permasalahan terkait strategi pengelolaan potensi sumberdaya alam dan manusianya, dimana strategi pengembangan BUMDes ini masih kurang optimal penyebabnya karena masyarakat Desa Bakal Gajah yang rata-rata bekerja sebagai petani lebih memilih bekerja diladang sendiri sehingga kurang berminat dan kurangnya minat pemuda desa untuk bekerja di BUMDes karena lebih mementingkan upah di awal.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs Desa, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat inovatif sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki

untuk kemudian diajukan sebagai rangka mengembangkan potensi sumberdaya melalui unit Badan Usaha Milik Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2012 : 60) adalah “pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Selanjutnya kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam kepentingan suatu kelompok yang kurang beruntung dalam kehidupan masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Anderson (dalam Muadi,dkk 2016:197), mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seseorang pelaku (aktor) atau sekelompok pelaku (aktor) guna memecahkan masalah tertentu”. Dalam pandangan ini kebijakan dinyatakan sebagai usaha

untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk ditujukan bagi kepentingan bersama dan kebutuhan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut Oakley (dalam Gitosaputro dan Rangga 2015 : 27) ialah “suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.

Adapun tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas, termasuk kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan kelompok

masyarakat. Kapasitas tersebut berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi untuk kesejahteraan bersama.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah Badan Usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) mengatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Hal ini didukung dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 ayat 2 tentang Badan Usaha Milik Desa “ Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa”. Dalam Nawacita ketiga “membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, pemerintah berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud BUMDes adalah suatu badan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar prakarsa dari masyarakat secara bersama, dimana pengelolanya adalah pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaksananya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pengelolaan beberapa unit usaha/potensi desa yang diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menambah sumber pendapatan asli desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi masing-masing individu berbeda atau kelompok masyarakat dan keluarga

berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar beberapa individu terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut telah terpenuhi. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dapat dikatakan individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan pedesaan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat menurut Mulyadi (2019 : 105) ialah “upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, dimana masyarakat dapat menggali dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan yang berpusat pada rakyat”. Dengan begitu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan dapat terealisasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang

digunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi SDGs Desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi. Informan penelitian ini antara lain adalah: Informan Kunci, (Bapak Sudung Sitorus), Kepala Desa Bakkal (Bapak Humitar Sitorus), Informan Utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang berperan atau yang sedang ikut dalam program unit usaha pengembangan BUMDes di Desa Bakal Gajah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Observasi Kualitatif, Observasi melalui Wawancara Kualitatif dan Dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar

peneliti, gambar atau foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bakal Gajah merupakan salah satu Desa dari 15 (Lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi yang didirikan tahun 1950 dengan luas wilayah 400 Ha, ketinggian 750 m di atas permukaan laut, Koordinat Bujur : 99,214767 dan Koordinat Lintang : 1,992378 dengan suhu rata-rata 25 °C dan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 221 KK, 720 Jiwa.

Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa untuk mencapai tujuan SGD Desa. Dimana masyarakat tidak lagi harus pergi jauh kedesa lain untuk mendapatkan gas, air minum dan

bahkan penggunaan jasa BRI Link sudah dekat untuk dan harga yang ditetapkan juga sudah sangat terjangkau karena ketetapan harga sudah kesepakatan dari pihak pemerintah desa, warung menjual air galon seharga Rp. 5.000 dengan harga beli Rp. 3.500 dari BUMDes, gas diperoleh dari BUMDes seharga Rp. 18.000 dan dijual ke masyarakat seharga Rp. 20.000. Hal tersebut sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya.

BUMDes pada dasarnya merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola serta di prakarsai oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya yang ada di desa. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas dasar prakarsa masyarakat dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Desa Bakal Gajah merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2019 yang diberi nama dengan BUMDes Gajah Mandiri yang didasari perencanaan dan pembentukan atas prakarsa seluruh

masyarakat. BUMDes dibentuk untuk dapat memberikan kemudahan-kemudahan melalui unit-unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dengan kesempatan yang diberikan berupa peluang kerja dan keuntungan lain yang ditawarkan berupa keterjangkauan harga, kemudahan akses dan keuntungan lainnya, manfaat kehadiran BUMDes ini bukan tidak lain adalah demi peningkatan pendapatan perekonomian sehingga tercapai kesejahteraan di masyarakat desa.

Perkembangan BUMDes terlihat bila usaha yang dikelola juga turut mengalami perubahan yang baik hal ini menjadi bukti yang nyata dengan munculnya usaha baru berupa pengelolaan pupuk organik dari hasil limbah kotoran ternak ayam milik PT. Japfa yang bekerjasama dengan BUMDes Desa Bakal Gajah. Untuk pemasaran harga pupuk organik seharga Rp. 60.000/ karung untuk diluar desa dan seharga Rp. 55.000/ karung untuk masyarakat desa Bakal Gajah. Kotoran ternak ayam tersebut tanpa melakukan penjemuran atau pengolahan lebih

lanjut sebab pupuk organik yang dijual kepada petani merupakan pupuk siap pakai.

Disamping manfaat dan keuntungan telah dirasakan masyarakat Desa Bakal Gajah melalui program-program BUMDes. Dalam membantu mewujudkan SDGs Desa melalui BUMDes maka pengembangan BUMDes sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa sehingga akan menciptakan tingkat kesejahteraan yang semakin terlihat di Desa Bakal Gajah sehingga akan dapat mencapai tujuan SDGs Desa yaitu desa tanpa kemiskinan. Namun seiring perkembangannya BUMDes Gajah Mandiri masih memiliki masalah kurangnya tenaga kerja untuk mengelola unit-unit usaha masih minim ketertarikan untuk menaruh minatnya terlibat dalam usaha yang dikembangkan BUMDes. Masih banyak masyarakat terlebih pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan justru lebih membuang waktunya untuk hal yang tidak berguna. Bahkan sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan namun kegiatan tersebut juga tidak disambut dengan

antusias. Untuk itu masyarakat diharapkan bersikap antusias dan juga mampu memberikan ide yang membangun untuk pengembangan BUMDes.

Pemerintah dan pihak pengelola telah berusaha memberikan program yang tepat bagi kebutuhan masyarakat secara teratur dan menjurus ke sasaran SDGs Desa. Potensi sumber daya alam yang tersedia dan potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi di desa yang layak dikembangkan sehingga dapat memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat desa. Pengembangan BUMDes di Desa Bakal Gajah akan dapat mendorong pembangunan secara keseluruhan dan secara berkelanjutan penyerapan tenaga kerja dan keuntungan lain yang didapat dari kehadiran BUMDes diharapkan akan dapat berdampak memperlancar pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan BUMDes di Desa Bakal Gajah Berdasarkan Konsep SDGs Desa (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai integrasi pilar pembangunan pada sosial, ekonomi dan lingkungan. BUMDes desa Bakal Gajah merupakan salah satu badan usaha yang dimana unit usaha peternakan ayamnya adalah usaha yang melakukan versi mitra dengan pihak perusahaan swasta.

Untuk membangun dan mengembangkan Desa Bakal Gajah melalui BUMDes tentu memerlukan kerjasama bukan hanya dengan lembaga pemerintah daerah namun juga pihak swasta dalam negeri

perlu ikut terlibat dalam pembangunan desa karena hal tersebut penting dalam sebuah pengelolaan kemajuan usaha. Supaya kerjasama tersebut mampu meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan melalui peluang kerja yang tersedia agar dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan di masyarakat dan tujuannya agar masyarakat lebih sejahtera. Demikian juga pengelolaan sumber daya alam terutama pada air bersih sudah menyasar pada tujuan SDGs Desa poin ke enam yaitu Air Bersih dan Sanitasi yang Layak. Sebab di Desa Bakal Gajah sendiri telah tersedia depot air minum yang diperoleh dari sumur bor dan dikelola oleh BUMDes dengan kualitas air minum yang baik. Terlebih semua masyarakat dapat memperoleh air minum tersebut dengan harga yang terjangkau.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah

Pada dasarnya setiap faktor dapat mendukung dan menghambat suatu program kebijakan yang

dibentuk, tergantung dilihat dari sisi mana faktor tersebut muncul. Adapun faktor-faktor dibawah ini dipisahkan antara faktor pendukung dan penghambat sesuai dengan hasil penelitian yang terjadi di lapangan.

Faktor Pendukung

BUMDes dalam perannya adalah mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa yang dimana memerlukan penanganan yang kooperatif, sehingga timbulnya ekonomi nasional yang ditopang oleh hasil perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen ini juga menjadi satu arah dengan kebijakan SDGs Desa dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan di desa. Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan BUMDes di Desa Bakal Gajah juga dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan setiap unit usaha yang diusahakan BUMDes “Gajah Mandiri”. Kesungguhan pemerintah dibuktikan dengan pemberian dana dan besarnya anggaran yang diberikan untuk mengembangkan BUMDes dan terciptanya kerjasama

dengan pihak PT. Japfa sebagai pihak swasta untuk pengelolaan unit peternakan ayam broiler (lampiran hal 103, bapak Sudung).

Keseriusan pemerintah desa Bakal Gajah terhadap keberlangsungan BUMDes memang cukup dikatakan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Dimana setiap potensi yang ada dimanfaatkan dengan baik. Misalnya hasil kotoran ayam dikelola menjadi kompos bagi kebutuhan petani yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan begitu usaha yang dikelola unit peternakan ayam juga disamping itu dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan keuangan BUMDes begitupun dengan tenaga kerja juga akan semakin tersedia bagi masyarakat desa (lampiran hal 104, Bapak Humitar).

Pemerintah telah menetapkan peraturan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Dimana sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri melalui pemanfaatan aset desa sebagai

sebuah potensi desa. Aset desa dapat berupa, sumber air, tanah ataupun sumber daya alam lainnya. BUMDes telah memiliki unit usaha depot air minum sebagai unit usaha pertama yang dikelola oleh BUMDes Gajah Mandiri dimana sebelumnya tahun 2014 mendapatkan bantuan dari badan meteorologi dan geofisika untuk membuat sumur bor dengan kedalaman 180 m, awalnya dengan sumur bor ketersediaan air di dusun 3 (tiga) dapat terbantu. Potensi lainnya dimana lahan pertanian yang cukup baik dapat menanam bawang merah begitupun dengan potensi utama yang dimiliki desa Bakal Gajah yaitu kopi robusta ini yang dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat desa secara berkelanjutan (lampiran hal 111, bapak Humitar).

Tujuan lain yang dapat dicapai dengan adanya BUMDes ini adalah dapat mengembangkan rencana kerja usaha antar desa atau dengan pihak ketiga (vers mitra) menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa serta

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa Bakal Gajah.

Faktor Penghambat

Otonomi desa merupakan sebuah peluang bagi desa dalam mengembangkan desa sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Kehadiran BUMDes adalah instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Tujuan dari SDGs Desa berupa pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak pun akan dapat dicapai apabila masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan usaha di BUMDes.

Namun keterlibatan masyarakat dalam pengembangan program BUMDes masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usahanya. Kendalanya selama ini masyarakat tidak melihat peluang tersebut sebagai potensi ekonomi, sumber daya manusia yang kurang dengan mindset yang masih rendah membuat masyarakat tidak dapat melihatnya sebagai sumber penghasilan. Pemberdayaan akan berjalan lebih baik, apabila

masyarakat mau berada dititik mau, maka BUMDes dapat menggerakkan itu menjadi bisa. Makanya BUMDes lambat berkembang dikarenakan masyarakatnya kurang memberi perhatiannya kepada BUMDes. Belum sepenuhnya masyarakat terlibat dalam pengembangan BUMDes, sumber daya manusianya masih belum maksimal berkembang.

Kehadiran BUMDes dalam menjalankan program dan usaha tidak lepas dari namanya anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola usaha maupun membantu mengembangkan unit usaha BUMDes. Sebagai lembaga usaha ekonomi desa keberadaan modal usaha salah satu nadi agar BUMDes dapat hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha akan dapat mengembangkan usaha namun apabila dana yang ada terbatas dapat mengakibatkan kemampuan pengelola dan usaha pun turut mundur. Dimana Pemerintah mendapatkan kuota sekitar 560 tabung dengan dana awal berkisar Rp.40 juta. Dengan awal berpikir hanya cukup kisaran Rp.40 juta namun setelah dilakukan bahkan

tiga kali lipat membutuhkan anggaran yang besar, sehingga keuangan BUMDes juga cukup kewalahan dengan itu dan bahkan pemerintah desa menggunakan biaya lain yang tidak berasal dari dana desa. Ditambah yang menjadi sedikit beban bagi keuangan BUMDes itu sendiri adalah dimana tujuan dari awal unit usaha pangkalan gas tidak untuk mencari keuntungan sehingga sedikit kesulitan bagaimana pendapatan dan upah yang bekerja di BUMDes (lampiran hal 109, bapak Sudung).

Kesimpulan

Development Goals (SDGs) Desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga. Adapun analisis kategori yang mempengaruhi suatu Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui di Desa Bakal Gajah meliputi:

1. Sumber daya, dalam kualitas sumber daya di Desa Bakal Gajah memanfaatkan tiga sumber daya, pertama sumber daya

manusia (SDM) dimana unit usaha BUMDes dapat menampung lowongan pekerjaan pada setiap unit usaha dibantu dengan sumber daya para implementor yang memiliki bidang sesuai unit usahanya masing-masing. Pengembangan unit usaha BUMDes tentunya menjadi salah satu motor penggerak perekonomian melalui beberapa unit usaha yang dikelola sekaligus berperan penting dalam meningkatkan kesempatan kerja. sehingga tercapai tujuan SDGs pada Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Namun dilihat dari sisi masyarakat sumber daya manusia itu sendiri kurang akibat mindset yang masih rendah membuat masyarakat tidak dapat melihatnya sebagai sumber penghasilan sehingga salah satu kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan pengembangan BUMDes.

2. Komunikasi, yang diperoleh masyarakat desa Bakal Gajah sudah cukup baik. Secara

umum komunikasi antar organisasi dalam pelaksana program kebijakan sudah cukup baik. Dimana antar pihak saling bertukar pikiran, arahan, pembinaan dan bahkan pelatihan kepada masyarakat serta masukan berupa ide untuk membentuk kerjasama dengan pihak swasta yakni PT. Japfa Comfeed pada unit usaha peternakan ayam broiler dan negeri yakni PT. Pertamina berupa unit usaha gas elpiji serta Bank Rakyat Indonesia berupa unit Bri Link. Komunikasi yang dilakukan antar lembaga pemerintah dan pengurus BUMDes mendorong terciptanya kerjasama agar dapat membantu desa juga masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Sehingga dengan adanya kerjasama dalam pengembangan BUMDes dapat mewujudkan tujuan SDGs Desa pada Desa Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Karena untuk membangun dan mengembangkan Desa Bakal Gajah melalui BUMDes tentu memerlukan kerjasama antar

pihak. Supaya kerjasama tersebut mampu meningkatkan pendapatan, meringankan kemiskinan melalui peluang kerja yang tersedia agar dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan di masyarakat dan tujuannya agar masyarakat lebih sejahtera.

3. Disposisi Implementor, respon para implementor dalam program pengembangan BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa sudah dapat dikategorikan baik. Pada dasarnya kesesuaian program dengan pedoman yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan lancar karena sudah memiliki mekanismenya. Para implementor sudah paham dengan tugas dan fungsinya dalam program pengembangan BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa sesuai dengan keahliannya masing-masing. Komitmen, dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui pengembangan BUMDes sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajibannya.

Terlihat dari keseriusan pemerintah bersama pengurus BUMDes senantiasa membuat terobosan baru dalam rancangan unit usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Desa bakal Gajah.

4. Struktur Birokrasi, masih terkendali dengan baik dimana sistem mekanisme kerja mereka mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku sehingga segala sesuatunya telah terencana dengan cukup baik, hal ini harus dipertahankan untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap analisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, maka rekomendasi yang dapat disampaikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga Instrumen pemberdayaan perekonomian

lokal di tingkat desa dengan berbagai jenis potensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan kini telah dapat dikatakan sangat baik, namun agar tujuan BUMDes dan ketercapaian SDGs Desa dapat berhasil secara keseluruhan maka diharapkan untuk lebih gencar memberikan motivasi. Himbauan atau ajakan melalui media sosial seperti facebook, Instagram yang merupakan strategi yang paling tepat untuk menggerakkan masyarakat terutama pemuda-pemudi desa dan dengan langsung mengadakan pertemuan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar mau memanfaatkan peluang jenis usaha pada BUMDes.

2. Dengan tujuan SDGs Desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan mampu memperbaiki kondisi unit usaha yang sedang dijalankan atau yang akan dibentuk sehingga akan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat.

3. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berperan dalam pengembangan BUMDes, lebih kreatif mampu memberikan ide dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, (2011). Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Creswell, John W, (2014). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N, (2000). *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gitosaputro, Sumaryo dan Rangga, Kordiyana K, (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Iskandar, A. Halim, (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T, (2012). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Edisi Ketiga, Gava Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mohammad, (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Sembilan Belas,

- Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprilia, dkk, (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman, (2019), *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW, (2012). *Otonomi Desa*, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wijaya, David, (2014). *Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta.

Jurnal

- Mualifah, Nurul dan Roekminati, Sri, (2018). "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri", *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol.2, No.1.
- Sholih Muadi, (2016). "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Volume 06, Nomor 2, Surabaya.